

BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

Novel *The Murder Case of Tok Imam Stopa Karde* menawarkan pemahaman mendalam mengenai dinamika identitas nasional dan lokal di Thailand. Identitas nasional ditampilkan melalui wacana ke-Thai-an yang menekankan keseragaman budaya, bahasa, dan loyalitas warga. Sementara itu, identitas masyarakat Thailand Selatan, terutama komunitas Muslim Melayu, terbentuk melalui proses asimilasi yang rumit. Mereka dikenal sebagai Thai-Muslim, sebuah identitas hibrida yang menggabungkan kesetiaan pada negara dengan pelestarian budaya dan agama lokal. Novel ini menyoroti interaksi antara kebijakan pemerintah dan budaya lokal, menunjukkan identitas sebagai hasil negosiasi kekuasaan dan ketahanan komunitas.

7.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan mengkaji representasi identitas nasional Thailand dalam novel *The Murder Case of Tok Imam Stopa Karde* melalui tiga aspek utama. Pertama, analisis karakter mengungkap konstruksi identitas nasional dalam narasi yang mencerminkan pandangan dan wacana negara. Kedua, novel menyoroti konflik identitas di wilayah Thailand Selatan, memperlihatkan ketegangan sosial dan politik yang kompleks. Ketiga, karya ini mengkritisi kebijakan sentralisasi pemerintah dan dampaknya terhadap komunitas lokal, dengan menggunakan

kerangka *governmentality* untuk memahami cara negara mengatur, mempengaruhi, dan membatasi identitas masyarakat.

Hasil analisis mendapati mengenai representasi berbagai aspek identitas nasional Thailand dalam novel *The Murder Case of Tok Imam Stopa Karde* melalui pengelompokan karakter menjadi tiga kategori: Penegak Identitas Nasional (Pracha Wongko-sin, Phithak Cheutchoothai, Sama-ae Cheutchoothai), Komunitas Lokal (Somchai Masulong, Hamid Mohammad, Karim Malate, Muhammad Karde, Abdullah Saleh, Karim Malateh, Siti Malateh, Abu Ahmad, Ali Tok-Ilcha), dan Tokoh Mediasi (Apichart Jamookhrut, Thomas Pagonis). Pembagian ini digunakan untuk menganalisis dinamika kekuasaan, identitas, dan resistensi. Analisis menunjukkan bahwa identitas Thai tidak tunggal, melainkan beragam dan dinamis. Watak tersebut memperlihatkan adanya percampuran, negosiasi, serta konflik dalam pembentukan identitas mereka. Hal ini menegaskan kompleksitas identitas nasional dalam konteks sosial-politik Thailand Selatan.

Kategori Penegak Identitas Nasional mencakup watak yang berkontribusi dalam membangun dan mempertahankan identitas nasional Thailand. Peran mereka tidak terbatas pada aspek administratif, melainkan juga sebagai agen ideologis yang bertugas menjaga kohesi di tengah keberagaman etnis dan budaya. Dari analisis karakter, muncul dua dinamika penting: pertama, hubungan Phithak dan Sama-ae Cheutchoothai yang mencerminkan strategi penciptaan identitas hibrida demi integrasi nasional; kedua, karakter Hamid Mohammad yang menunjukkan bahwa kesetiaan terhadap negara dapat melampaui batasan identitas etnis. Kedua contoh ini memperlihatkan kompleksitas negosiasi identitas nasional.

Seterusnya analisis membahas mengenai pengaruh kebijakan Pembangunan bangsa di Thailand, yang dikenal sebagai *Rat Niyom*. Kebijakan ini menekankan homogenisasi identitas nasional melalui bahasa Thai, budaya, dan agama Buddha. Upaya pemerintah Thailand untuk membangun identitas nasional yang berfokus pada budaya dominan berbenturan dengan realitas di Thailand selatan, di mana mayoritas penduduk beretnis Melayu dan beragama Islam. Kebijakan asimilasi ini menyebabkan ketegangan sosial, budaya, dan politik, karena komunitas lokal berusaha mempertahankan bahasa, agama, dan tradisi mereka. Akibatnya, muncul ketimpangan dan konflik antara kelompok yang mendukung agenda negara dan mereka yang menolak. Situasi ini memperlihatkan kompleksitas dalam membentuk identitas nasional di tengah keberagaman yang kuat di tingkat lokal.

Bahasa dan budaya menjadi medan utama perlawanan, dengan upaya mempertahankan bahasa lokal sebagai bentuk resistensi terhadap asimilasi. Selain itu, aspek keagamaan juga menjadi ruang penting untuk mempertahankan identitas etno-religius.

Proses penyatuan identitas ini memaksa individu untuk meninggalkan nilai dan tradisi lokal yang telah lama mengakar, sehingga memperdalam ketimpangan sosial dan memperkuat rasa keterasingan di kalangan masyarakat tertentu. Novel ini memperlihatkan bagaimana upaya negara untuk menyatukan identitas justru memperlemah kohesi sosial di wilayah-wilayah pinggiran.

Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa generasi muda lebih cenderung menerima identitas nasional yang dipaksakan negara, sementara generasi tua tetap mempertahankan identitas lokal. Pergeseran ini mencerminkan bagaimana identitas dibentuk oleh perubahan sosial-politik. Beberapa karakter

dalam novel menginternalisasi ideologi negara, baik secara sadar maupun tidak. Namun, ada juga tokoh yang mengalami dilema identitas atau dikriminalisasi karena mempertahankan identitas Muslim, seperti dalam penggunaan nama atau praktik keagamaan, yang dianggap bertentangan dengan narasi nasional negara.

Kematian Tok Imam dalam novel ini membawa dampak emosional dan simbolik yang besar bagi masyarakat Tanyong Baru. Kehilangannya bukan hanya sebagai kehilangan tokoh agama, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keberlanjutan budaya dan spiritualitas komunitas. Penggambaran ini memperlihatkan bagaimana masyarakat yang terpinggirkan berjuang untuk mempertahankan identitas mereka dalam menghadapi kekuasaan negara yang ingin mengubah nilai-nilai lokal mereka.

Relasi kekuasaan dalam konteks reformasi birokrasi dapat dianalisis melalui konsep *governmentality* yang diperkenalkan Michel Foucault. Konsep ini menggambarkan bagaimana negara mengontrol individu dan populasi melalui teknik-teknik pemerintahan yang menginternalisasi kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya tercermin dalam hukum atau kekerasan, tetapi juga dalam bagaimana individu dan masyarakat mengakui serta menerima kontrol tersebut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, menciptakan populasi yang patuh dan terstruktur.

Konsep *governmentality*, ini memberikan perspektif analitis untuk mengungkap bagaimana negara mengelola perilaku dan identitas warganya melalui kebijakan, institusi, dan praktik sosial. Melalui *governmentality*, negara mengarahkan individu dan populasi dengan teknik pemerintahan yang menginternalisasi kekuasaan. Praktik ini bertujuan agar kekuasaan diakui dan sah secara sosial, tidak hanya melalui kekerasan atau hukum, tetapi dengan cara

masyarakat menginternalisasi kontrol dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan populasi yang patuh dan terstruktur dalam sistem sosial tersebut.

Kekuasaan dalam hal ini terinternalisasi dalam individu dan masyarakat, menghasilkan kepatuhan yang luas. Namun, resistensi muncul melalui tokoh-tokoh yang mengembangkan identitas hibrida, menunjukkan pergeseran identitas Melayu Pattani ke arah identitas Thailand. Proses ini mengilustrasikan bagaimana karakter-karakter tersebut, meskipun dipengaruhi oleh kebijakan dan tekanan negara, tetap mempertahankan nilai-nilai dan kepercayaan komunitas mereka. Identitas lokal dipertahankan sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi negara, sekaligus menegaskan bahwa warisan budaya dan agama memiliki peran yang lebih signifikan dibandingkan identitas nasional yang dipaksakan.

7.2 Saran

Penelitian ini disarankan untuk memperluas fokus dengan meninjau dimensi prakolonial dalam pembentukan identitas Melayu Patani. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana warisan sejarah dan tradisi sebelum integrasi ke Thailand modern tetap memengaruhi representasi tokoh dalam sastra. Kajian terhadap budaya, agama, dan struktur sosial prakolonial dapat memperdalam pemahaman konflik identitas di Thailand Selatan. Limitasi penelitian saat ini adalah konsentrasi pada dinamika kontemporer tanpa mengkaji akar sejarah secara mendalam. Implikasinya, pendekatan prakolonial menawarkan perspektif lebih luas untuk memahami kesinambungan identitas lokal dan konflik yang berlangsung hingga kini.